

Relevance of the Ministry of Religious Affairs' Religious Education Curriculum: Analysis of Knowledge, Skills, and Policy Implementation Gaps

Relevansi Kurikulum Pendidikan Agama Kementerian Agama: Analisis Kesenjangan Pengetahuan, Keterampilan, dan Implementasi Kebijakan

Author's Name* : Dwi Agustiniingsih
Institution/University : Bureau of Planning and Budgeting, Ministry of Religious of the Republic of Indonesia
Correspondence Author's E-mail : dwi.of.a@gmail.com

Article History	Received (September 19 th , 2025)	Revised (October 27 th , 2025)	Accepted (December 9 th , 2025)
-----------------	---	--	---

News Article

Keyword:

Religious Education Curriculum; Ministry of Religious Affairs; Knowledge Gap; Skills; Policy Implementation.

Abstract

This policy paper aims to analyze the gap between the religious education curriculum implemented by the Ministry of Religious Affairs and the knowledge and skills needs of students in the digital era. The background of this problem is the lack of relevance of the curriculum to current developments that require students to have digital literacy, critical thinking skills, and multicultural understanding. The research method used is a qualitative approach with case studies in several madrasahs and public schools in Indonesia, involving in-depth interviews with teachers, students, and policymakers, as well as analysis of curriculum documents. The results of the study indicate a significant gap, where teaching materials tend to focus on theoretical aspects and memorization, while practical skills and the implementation of religious values in daily life are still minimal. Further discussion highlights that the implementation of curriculum policies is often hampered by a lack of teacher training, inadequate supporting facilities, and resistance to change. The conclusion of this study is that the current religious education curriculum requires substantial reform to be more relevant and adaptive to contemporary challenges. Recommendations include developing a competency-based curriculum, strengthening teacher training programs, integrating technology into learning, and developing more participatory policies.

Kata Kunci:

Kurikulum Pendidikan Agama; Kementerian Agama; Kesenjangan Pengetahuan; Keterampilan; Implementasi Kebijakan.

Abstrak

Policy Paper ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan antara kurikulum pendidikan agama yang diterapkan oleh Kementerian Agama dengan kebutuhan pengetahuan dan keterampilan siswa di era digital. Latar belakang masalah ini adalah kurangnya relevansi kurikulum dengan perkembangan zaman yang menuntut peserta didik memiliki literasi digital, keterampilan berpikir kritis, dan pemahaman multikultural. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus di beberapa madrasah dan sekolah umum di Indonesia, melibatkan wawancara mendalam dengan guru, siswa, dan pembuat kebijakan, serta analisis dokumen kurikulum. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan signifikan, di mana materi ajar

cenderung berfokus pada aspek teoretis dan hafalan, sementara keterampilan praktis dan implementasi nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari masih minim. Pembahasan lebih lanjut menyoroti bahwa implementasi kebijakan kurikulum seringkali terkendala oleh kurangnya pelatihan guru, minimnya fasilitas pendukung, dan resistensi terhadap perubahan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kurikulum pendidikan agama saat ini memerlukan reformasi substansial agar lebih relevan dan adaptif terhadap tantangan kontemporer. Rekomendasi yang diajukan meliputi pengembangan kurikulum yang berbasis kompetensi, penguatan program pelatihan guru, integrasi teknologi dalam pembelajaran, dan penyusunan kebijakan yang lebih partisipatif.

To cite this article: Dwi Agustiningsih. (2025). "Relevance of the Ministry of Religious Affairs' Religious Education Curriculum: Analysis of Knowledge, Skills, and Policy Implementation Gaps". *AMUYA: Indonesian Journal of Management Reviews*, Volume 1 (2), Page: 167 – 192.



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](#) ©2025 by author/s

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa. Kurikulum, sebagai jantung dari sistem pendidikan, memegang peranan krusial dalam membentuk individu yang siap menghadapi tantangan masa depan. Namun, seiring dengan laju perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang semakin cepat, muncul pertanyaan mendasar: apakah kurikulum yang ada saat ini masih relevan dengan kebutuhan zaman? Kesenjangan antara kurikulum dan realitas dunia kerja sering kali menjadi isu sentral dalam diskusi pendidikan global (P21, 2019). Fenomena ini tidak hanya berdampak pada individu yang lulus, tetapi juga pada daya saing suatu negara.

Pada era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0, tuntutan terhadap kompetensi individu telah bergeser secara signifikan. Jika sebelumnya fokus pendidikan adalah pada penguasaan pengetahuan faktual, kini penekanannya beralih pada kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, kreativitas, dan komunikasi, yang dikenal sebagai keterampilan abad ke-21 (OECD, 2018). Keterampilan ini tidak hanya relevan untuk dunia kerja, tetapi juga penting untuk partisipasi aktif sebagai warga negara dalam masyarakat yang kompleks dan saling terhubung.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa banyak kurikulum pendidikan, baik di tingkat dasar, menengah, maupun tinggi, masih cenderung berorientasi pada konten yang statis dan kurang adaptif. Hal ini menyebabkan lulusan sering kali tidak memiliki keterampilan lunak (*soft skills*) dan keterampilan teknis (*hard skills*) yang dibutuhkan oleh pasar kerja (World Bank, 2019). Sebagai contoh, meskipun teknologi kecerdasan buatan (AI) dan *big data* menjadi motor penggerak ekonomi global, banyak institusi pendidikan masih belum mengintegrasikan materi-materi terkait secara memadai dalam kurikulum mereka. Dampaknya, terjadi mismatch antara ketersediaan tenaga kerja dengan kebutuhan industri, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi (McKinsey & Company, 2020).

Oleh karena itu, urgensi untuk mereformasi kurikulum menjadi sebuah keharusan. Reformasi ini bukan hanya sekadar mengganti mata pelajaran, melainkan sebuah transformasi holistik yang mencakup tujuan, isi, metode pembelajaran, dan sistem evaluasi. Kurikulum yang relevan harus mampu menumbuhkan rasa ingin tahu, mendorong pembelajaran sepanjang hayat, dan membekali siswa dengan kemampuan

untuk beradaptasi dengan perubahan. Dengan demikian, pendidikan dapat benar-benar berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan generasi muda dengan masa depan yang dinamis dan tak terduga, memastikan bahwa mereka tidak hanya menjadi konsumen pengetahuan, tetapi juga produsen dan inovator yang mampu menciptakan perubahan positif.

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat majemuk yang kaya akan keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Keberagaman ini, di satu sisi, merupakan aset bangsa yang tak ternilai, namun di sisi lain, juga menyimpan potensi konflik jika tidak dikelola dengan baik. Toleransi, sebagai sikap saling menghargai dan menerima perbedaan, menjadi pilar utama dalam menjaga harmoni sosial (United Nations, 1995). Oleh karena itu, pendidikan memiliki peran krusial dalam menanamkan nilai-nilai toleransi dan keberagaman sejak dini. Namun, realitasnya, implementasi pembelajaran tentang toleransi dan keberagaman masih menghadapi berbagai keterbatasan yang signifikan.

Berbagai riset dan laporan menunjukkan bahwa meskipun kurikulum pendidikan di Indonesia secara normatif mencantumkan nilai-nilai kebhinekaan, praktik pembelajarannya sering kali belum optimal. Pembelajaran cenderung bersifat kognitif, hanya sebatas penyampaian materi teoritis tanpa disertai pengalaman interaktif dan kontekstual yang mendalam (Suharsono, 2017). Akibatnya, pemahaman siswa tentang toleransi sering kali dangkal dan tidak terinternalisasi menjadi sikap dan perilaku sehari-hari. Mereka mungkin tahu bahwa toleransi itu penting, tetapi kurang memiliki keterampilan untuk menerapkannya dalam situasi nyata, seperti menghadapi perbedaan pendapat atau keyakinan.

Keterbatasan lain terletak pada metode pembelajaran yang sering kali masih didominasi oleh pendekatan satu arah. Kurangnya ruang diskusi, studi kasus, atau proyek kolaboratif yang melibatkan siswa dari berbagai latar belakang membuat mereka tidak terbiasa untuk berinteraksi dan memahami perspektif yang berbeda (Hidayat, 2018). Sekolah yang cenderung homogen, baik dari segi latar belakang sosial ekonomi maupun agama, juga dapat menjadi tantangan tersendiri. Lingkungan yang kurang beragam ini dapat membatasi kesempatan siswa untuk berinteraksi langsung dengan "yang berbeda," sehingga stereotip dan prasangka sulit untuk terkikis (Rosyada, 2017).

Selain itu, faktor pendidik juga memegang peranan penting. Keterbatasan pemahaman dan keterampilan pedagogis guru dalam mengintegrasikan isu-isu sensitif seperti keberagaman agama atau keyakinan ke dalam pembelajaran secara netral dan inklusif dapat menjadi hambatan. Beberapa pendidik mungkin merasa canggung atau menghindari topik-topik ini karena khawatir memicu perdebatan atau kesalahpahaman. Padahal, peran guru sebagai fasilitator sangat esensial dalam menciptakan ruang kelas yang aman dan inklusif di mana siswa dapat mengeksplorasi dan mendiskusikan perbedaan dengan rasa hormat (UNESCO, 2017). Dengan demikian, diperlukan upaya sistematis untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan ini agar pendidikan dapat secara efektif menumbuhkan generasi yang tidak hanya memahami, tetapi juga menghayati dan mengamalkan nilai-nilai toleransi dan keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat.

Pendidikan tinggi sering kali dianggap sebagai jembatan yang menghubungkan individu dengan dunia profesional. Kurikulum universitas dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan teoritis yang mendalam dan keterampilan yang relevan. Namun, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh lulusan baru adalah kesenjangan yang nyata antara pengetahuan yang mereka peroleh di bangku kuliah dengan tuntutan praktis di dunia kerja (OECD, 2017). Kesenjangan ini, yang sering disebut sebagai "*skill gap*," tidak hanya menjadi masalah bagi individu, tetapi juga

berdampak pada produktivitas perusahaan dan daya saing ekonomi suatu negara secara keseluruhan.

Fenomena kesenjangan antara teori dan aplikasi ini dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Secara teoretis, mahasiswa mempelajari konsep-konsep, model, dan kerangka kerja yang solid. Sebagai contoh, mahasiswa manajemen mungkin memahami model-model strategis seperti SWOT atau *Porter's Five Forces*, tetapi mereka sering kali kurang memiliki pengalaman dalam menerapkannya untuk menganalisis masalah bisnis riil di sebuah perusahaan (McKinsey & Company, 2020). Demikian pula, mahasiswa ilmu komputer mungkin menguasai berbagai bahasa pemrograman, tetapi mereka mungkin tidak terbiasa dengan siklus pengembangan perangkat lunak yang kompleks atau bekerja dalam tim multidisiplin dengan tenggat waktu yang ketat.

Salah satu penyebab utama dari kesenjangan ini adalah kurikulum yang terkadang kurang responsif terhadap dinamika pasar kerja yang berubah dengan cepat. Banyak institusi pendidikan masih menggunakan materi ajar yang sudah ketinggalan zaman dan tidak mengintegrasikan teknologi atau metodologi terbaru yang relevan dengan industri (World Bank, 2019). Selain itu, kurangnya pengalaman praktis yang memadai, seperti magang yang terstruktur, proyek kolaboratif dengan industri, atau studi kasus nyata, membuat lulusan tidak memiliki kesempatan untuk menguji dan menerapkan pengetahuan teoritis mereka dalam situasi yang autentik. Akibatnya, mereka memasuki dunia kerja dengan pemahaman yang murni akademis, tetapi minim pengalaman praktis dalam memecahkan masalah.

Kesenjangan ini diperparah oleh kurangnya kolaborasi yang erat antara dunia akademis dan industri. Perusahaan sering mengeluhkan bahwa lulusan kurang memiliki keterampilan lunak (*soft skills*) seperti komunikasi, kerja tim, dan berpikir kritis, yang jarang menjadi fokus utama dalam kurikulum (Cahyono & Wulandari, 2018). Sebaliknya, universitas mungkin tidak memiliki data yang cukup mutakhir tentang kebutuhan keterampilan yang spesifik dari berbagai sektor industri. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk menjembatani kesenjangan ini. Mengintegrasikan magang wajib, membangun kemitraan strategis dengan perusahaan, dan mengadaptasi kurikulum agar lebih berorientasi pada proyek dan praktik nyata adalah langkah-langkah krusial yang harus diambil agar pendidikan tinggi dapat menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas secara teoretis, tetapi juga kompeten dan siap kerja secara praktis.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kurikulum tidak relevan dengan kebutuhan zaman

Di era disrupsi teknologi dan perubahan sosial yang cepat, kurikulum pendidikan sering kali gagal mengikuti perkembangan zaman, sehingga menciptakan kesenjangan antara apa yang diajarkan di sekolah dan keterampilan yang dibutuhkan di dunia nyata. Berbagai laporan, seperti yang diterbitkan oleh McKinsey & Company (2020) dan Bank Dunia (2019), menunjukkan bahwa banyak lulusan tidak memiliki kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah kompleks, atau literasi digital yang esensial untuk pasar kerja saat ini. Kesenjangan ini disebabkan oleh kurikulum yang masih berfokus pada penguasaan pengetahuan faktual yang statis, sementara dunia kerja menuntut kemampuan adaptif dan kreatif (OECD, 2018). Akibatnya, pendidikan tidak hanya kurang efektif dalam menyiapkan individu

untuk masa depan, tetapi juga berpotensi menghambat inovasi dan pertumbuhan ekonomi.

2. Keterbatasan pembelajaran tentang toleransi dan keberagaman

Meskipun masyarakat Indonesia dikenal kaya akan keberagaman, pembelajaran tentang toleransi dan keberagaman di madrasah masih menghadapi keterbatasan signifikan yang menghambat internalisasi nilai-nilai tersebut. Pendidikan sering kali cenderung berfokus pada pendekatan kognitif, di mana siswa hanya mempelajari teori tentang pentingnya toleransi tanpa dibekali pengalaman interaktif yang memadai (Hidayat, 2018). Keterbatasan ini diperparah oleh kurangnya ruang diskusi terbuka dan metode pembelajaran yang monoton, yang gagal mendorong siswa untuk berinteraksi langsung dengan perbedaan, sehingga stereotip dan prasangka sulit untuk terkikis (Rosyada, 2017). Akibatnya, pemahaman tentang toleransi hanya berhenti pada tingkat pengetahuan, bukan menjadi sikap dan perilaku yang terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari (Suharsono, 2017).

3. Kesenjangan antara teori dan aplikasi dalam dunia kerja

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi lulusan perguruan tinggi adalah kesenjangan nyata antara pengetahuan teoritis yang mereka peroleh di kelas dengan tuntutan praktis di dunia kerja. Banyak laporan, termasuk dari OECD (2017) dan World Bank (2019), menunjukkan bahwa kurikulum pendidikan sering kali gagal membekali mahasiswa dengan keterampilan esensial yang sangat dibutuhkan oleh industri, seperti kemampuan pemecahan masalah praktis, komunikasi, dan kerja tim. Kesenjangan ini diperburuk oleh kurangnya pengalaman langsung melalui magang atau proyek kolaboratif, yang membuat lulusan masuk ke dunia profesional dengan pemahaman yang solid secara akademis, tetapi minim pengalaman dalam menerapkan teori tersebut untuk memecahkan masalah nyata. Akibatnya, terjadi ketidaksesuaian antara kompetensi yang dihasilkan oleh sistem pendidikan dan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, kemudian penulis menganalisisnya untuk menemukan masalah utamanya melalui pendekatan analisis USG (*Urgency, Seriousness, Growth*) dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Analisis *Urgency, Seriousness, Growth* (USG)

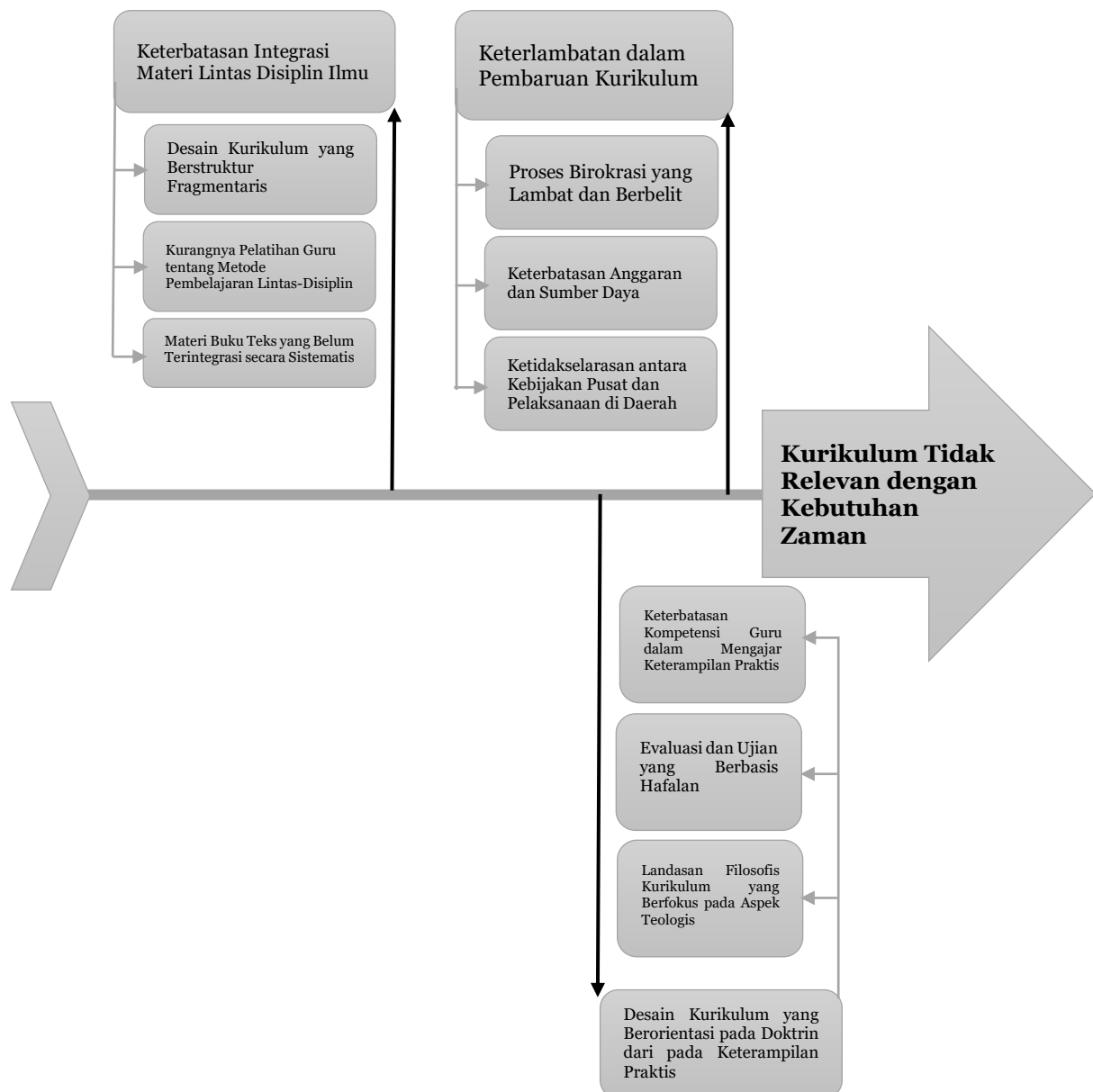
Metode USG (*Urgency, Seriousness, Growth*) untuk menentukan prioritas penanganannya. Penilaian menggunakan skala 1-5, di mana 1 adalah sangat rendah dan 5 adalah sangat tinggi.

No	Masalah	U	S	G	Total
1	Kurikulum Tidak Relevan dengan Kebutuhan Zaman Masalah ini sangat mendesak karena lulusan tidak memiliki bekal yang memadai untuk menghadapi dunia kerja dan tantangan sosial kontemporer. Jika dibiarkan, kesenjangan antara pendidikan dan realitas akan terus melebar, membuat pendidikan agama kurang relevan di mata masyarakat.	5	5	4	14
2	Keterbatasan Pembelajaran tentang Toleransi dan Keberagaman Masalah ini memiliki tingkat keseriusan dan potensi pertumbuhan yang sangat tinggi. Kurangnya pemahaman toleransi dapat memicu konflik sosial dan intoleransi di masa depan, yang berpotensi menjadi masalah yang lebih besar dan sulit diatasi. Ini adalah masalah mendesak yang memerlukan intervensi segera.	4	5	4	13
3	Kesenjangan antara Teori dan Aplikasi dalam Dunia Kerja Masalah ini memiliki urgensi yang sedikit lebih rendah dibandingkan dua masalah lainnya. Dampaknya lebih terasa pada	3	4	3	10

No	Masalah	U	S	G	Total
	individu (lulusan yang kesulitan mencari pekerjaan), namun jika dibiarkan, akan merusak citra pendidikan agama secara keseluruhan dan membuat lembaga pendidikan agama dianggap tidak relevan.				

Berdasarkan analisis USG ini, masalah "Kurikulum Tidak Relevan dengan Kebutuhan Zaman" menempati prioritas tertinggi karena memiliki potensi paling besar untuk menimbulkan dampak serius dan memburuk di masa depan jika tidak segera ditangani. Masalah " Keterbatasan Pembelajaran tentang Toleransi" berada di posisi kedua, sedangkan masalah "Kesenjangan dengan Dunia Kerja" berada di posisi ketiga.

Berdasarkan Identifikasi Masalah di atas, akar masalahnya dapat diilustrasikan dalam bentuk *diagram fishbone* berikut ini:



Gambar 1. Diagram *Fishbone*

Rumusan Masalah

Kurikulum pendidikan agama yang diterapkan di bawah Kementerian Agama saat ini menghadapi tantangan serius karena kurang relevan dengan kebutuhan zaman. Masalah ini berakar pada sistem pendidikan yang terlalu berorientasi pada pengetahuan dan dogma alih-alih pada pengembangan keterampilan praktis dan karakter. Akibatnya, lulusan tidak memiliki bekal yang memadai untuk menghadapi tantangan modern seperti literasi digital, toleransi, dan kewirausahaan. Hal ini diperparah oleh ketidakselarasan antara kebijakan yang dirumuskan di pusat dengan implementasi di lapangan, yang membuat pembaruan kurikulum berjalan lambat dan tidak merata, sehingga menciptakan kesenjangan antara teori yang diajarkan dan realitas yang harus dihadapi siswa di masyarakat.

Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan Kajian:

Untuk mengevaluasi sejauh mana kurikulum pendidikan agama yang ditetapkan oleh Kementerian Agama relevan dengan kebutuhan pengetahuan dan keterampilan siswa di era modern. Secara spesifik, kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kesenjangan yang ada antara kurikulum yang ada dengan kebutuhan nyata siswa, baik dari segi penguasaan konsep, keterampilan praktis, maupun implementasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk mengkaji tantangan dan hambatan dalam implementasi kebijakan kurikulum di tingkat sekolah dan madrasah.

Manfaat Kajian:

1. Bagi Kementerian Agama: Hasil makalah kebijakan ini dapat menjadi masukan penting bagi Kementerian Agama dalam melakukan reformasi kurikulum. Data dan temuan yang disajikan dapat membantu perumusan kebijakan yang lebih efektif, adaptif, dan relevan dengan perkembangan zaman.
2. Bagi Pendidik: Kajian ini dapat memberikan pemahaman mendalam bagi para guru dan pendidik tentang kesenjangan antara kurikulum dan kebutuhan siswa. Hal ini diharapkan dapat mendorong mereka untuk mengembangkan metode pengajaran yang lebih inovatif dan kontekstual.
3. Bagi Peserta Didik: Dengan adanya perbaikan kurikulum, peserta didik akan memperoleh pendidikan agama yang tidak hanya berfokus pada aspek teoretis, tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan dan pemahaman yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di masyarakat global.
4. Bagi Masyarakat Umum: Makalah kebijakan ini dapat meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya pendidikan agama yang relevan dan holistik. Dengan demikian, diharapkan tercipta lulusan yang tidak hanya berintegritas moral, tetapi juga memiliki kemampuan untuk berkontribusi secara positif dalam masyarakat.

KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

Kerangka Teori

1. Teori kurikulum fungsional (*functional curriculum theory*)

Teori ini berpendapat bahwa kurikulum harus relevan dan praktis, membekali siswa dengan keterampilan yang mereka butuhkan untuk berfungsi secara efektif dalam masyarakat. Kurikulum yang terlalu berorientasi pada doktrin dianggap gagal dalam memenuhi tujuan fungsional ini karena tidak mempersiapkan siswa untuk tantangan nyata di dunia kerja dan sosial.

Teori Kurikulum Fungsional adalah pendekatan pendidikan yang berfokus pada pengembangan kurikulum berdasarkan keterampilan dan pengetahuan yang secara langsung relevan dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Berbeda dengan pendekatan kurikulum tradisional yang sering kali berorientasi pada subjek akademis yang terpisah, teori ini menekankan pada pembelajaran yang bersifat kontekstual dan fungsional, yang bertujuan untuk mempersiapkan individu agar dapat berfungsi secara mandiri dan efektif di masyarakat (Eichinger & Downing, 2011). Inti dari teori ini adalah memastikan bahwa apa yang dipelajari siswa memiliki makna praktis dan langsung berguna untuk mengatasi tantangan dalam kehidupan pribadi, sosial, dan profesional mereka. Oleh karena itu, kurikulum fungsional sangat relevan bagi siswa dengan kebutuhan khusus atau mereka yang memerlukan dukungan tambahan untuk mencapai kemandirian.

Berikut adalah langkah-langkah sistematis untuk menerapkan Kurikulum Fungsional:

a. Penilaian kebutuhan individual (*individual needs assessment*)

Langkah *pertama* adalah melakukan penilaian komprehensif terhadap kebutuhan, minat, dan tujuan jangka panjang setiap individu siswa. Penilaian ini harus mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti keterampilan hidup sehari-hari (misalnya, memasak, berbelanja), keterampilan vokasional (misalnya, etos kerja, keterampilan kerja spesifik), keterampilan sosial, dan keterampilan komunikasi. Contoh Aplikasi: Pendidik dapat menggunakan observasi, wawancara dengan siswa dan keluarga, dan instrumen penilaian formal untuk mengidentifikasi area-area di mana siswa memerlukan dukungan paling banyak.

b. Identifikasi keterampilan fungsional (*functional skills identification*)

Berdasarkan hasil penilaian, tentukan keterampilan spesifik yang paling fungsional dan relevan bagi siswa untuk mencapai kemandirian dan partisipasi penuh di masyarakat. Keterampilan ini tidak terbatas pada subjek akademis, tetapi mencakup domain kehidupan nyata. Contoh Aplikasi: Jika seorang siswa berencana untuk tinggal mandiri, keterampilan yang relevan mungkin termasuk kemampuan mengelola uang, menggunakan transportasi umum, atau memasak makanan sederhana.

c. Pengembangan tujuan berbasis keterampilan (*skill-based goal development*)

Merumuskan tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur (SMART Goals) yang berfokus pada penguasaan keterampilan fungsional yang telah diidentifikasi. Tujuan ini harus spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu. Alih-alih "siswa akan memahami konsep matematika," tujuannya bisa menjadi "siswa akan mampu menghitung total biaya belanjaan di supermarket dalam waktu 5 menit."

d. Desain pembelajaran kontekstual (*contextual learning design*)

Merancang kegiatan pembelajaran yang dilakukan dalam konteks dan lingkungan nyata di mana keterampilan tersebut akan digunakan.

Pembelajaran tidak hanya terjadi di dalam kelas, tetapi juga di lingkungan komunitas, seperti supermarket, bank, atau tempat kerja. Contoh Aplikasi: Untuk mengajarkan keterampilan berbelanja, guru membawa siswa ke supermarket nyata dan mempraktikkan cara membuat daftar belanja, membandingkan harga, dan membayar di kasir.

e. Evaluasi berbasis kinerja (*performance-based evaluation*)

Evaluasi dilakukan berdasarkan kemampuan siswa untuk menunjukkan penguasaan keterampilan fungsional dalam situasi nyata, bukan hanya melalui tes tertulis. Penilaian ini berfokus pada kinerja dan aplikasi praktis. Contoh Aplikasi: Penilaian terhadap keterampilan memasak tidak hanya melalui ujian teori, tetapi dengan mengamati siswa saat mereka memasak hidangan secara mandiri, dari persiapan hingga penyajian.

2. Teori kritis dalam pendidikan (*critical pedagogy*)

Teori yang dipelopori oleh Paulo Freire ini menekankan pentingnya pendidikan sebagai alat untuk membebaskan siswa dari penindasan dan ketidakadilan. Dalam konteks ini, kurikulum yang monolitik dan doktrinal dapat dianggap sebagai bentuk "pendidikan gaya bank" (*banking education*), di mana siswa hanya menerima informasi pasif tanpa diajak berpikir kritis atau menantang status quo.

Teori Kritis dalam Pendidikan, atau *Critical Pedagogy*, adalah sebuah filosofi pendidikan yang dipelopori oleh tokoh seperti Paulo Freire. Teori ini memandang pendidikan bukan sebagai proses netral, melainkan sebagai alat untuk mentransformasi masyarakat dan membebaskan individu dari penindasan. Berbeda dengan model pendidikan tradisional yang sering disebut "pendidikan gaya bank" (*banking education*)—di mana guru menuangkan pengetahuan ke dalam pikiran siswa yang pasif—Pedagogi Kritis mendorong siswa dan guru untuk menjadi subjek aktif dalam proses belajar (Freire, 1970). Intinya, pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan kesadaran kritis (*critical consciousness*) pada siswa, yaitu kemampuan untuk menganalisis dan mempertanyakan struktur kekuasaan, ketidakadilan, serta norma-norma sosial yang ada, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam menciptakan perubahan sosial yang lebih adil dan merata.

Berikut adalah langkah-langkah praktis untuk menerapkan Teori Kritis dalam Pendidikan:

a. Dialog dan partisipasi aktif

Ganti metode pembelajaran satu arah dengan dialog yang setara antara guru dan siswa. Dalam dialog ini, pengetahuan tidak hanya berasal dari guru, tetapi juga dari pengalaman dan pemahaman siswa sendiri. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa menggali makna, bukan sekadar memberikan fakta. Contoh Aplikasi: Alih-alih ceramah tentang sejarah kemiskinan, guru bisa mengajak siswa berdiskusi tentang pengalaman mereka atau orang-orang di sekitar mereka terkait isu ekonomi.

b. Problematisasi masalah kehidupan nyata

Jadikan isu-isu sosial dan politik yang relevan dalam kehidupan siswa sebagai pusat kurikulum. Isu-isu seperti ketidaksetaraan, diskriminasi, lingkungan, atau media sosial dijadikan "masalah" (*problem*) yang harus dianalisis dan dicari solusinya bersama. Contoh Aplikasi: Dalam pelajaran biologi, alih-alih hanya mempelajari ekosistem, siswa diajak menganalisis masalah nyata seperti

polusi sungai di sekitar sekolah dan memikirkan tindakan yang bisa mereka ambil.

c. Refleksi kritis (*reflection*)

Ajak siswa untuk terus merefleksikan apa yang mereka pelajari. Proses ini melibatkan pemikiran mendalam tentang bagaimana pengetahuan tersebut berhubungan dengan kehidupan pribadi dan struktur kekuasaan yang lebih besar. Tujuannya adalah untuk memahami akar penyebab dari masalah yang mereka hadapi. Contoh Aplikasi: Setelah diskusi tentang masalah polusi, siswa diminta menulis jurnal atau esai tentang peran masing-masing pihak (pemerintah, perusahaan, masyarakat) dalam masalah tersebut.

d. Aksi sosial dan transformasi (*praxis*)

Pendidikan tidak berakhir pada pemahaman. Langkah terakhir adalah mendorong siswa untuk mengambil tindakan nyata (*praxis*) berdasarkan refleksi mereka. Aksi ini bisa berupa kampanye, proyek layanan masyarakat, atau partisipasi dalam advokasi untuk menciptakan perubahan positif. Contoh Aplikasi: Siswa tidak hanya berdiskusi tentang polusi, tetapi juga membuat petisi kepada pemerintah setempat, mengorganisir program kebersihan lingkungan, atau membuat kampanye edukasi untuk warga sekitar.

3. Teori pendidikan multikultural (*multicultural education theory*)

Teori ini, yang dikembangkan oleh James Banks, berfokus pada pentingnya kurikulum yang inklusif dan mengakui keberagaman budaya, etnis, dan agama. Kurikulum yang monolitik dan tidak mengajarkan toleransi secara mendalam dianggap gagal memenuhi prinsip ini, karena cenderung memperkuat pandangan eksklusif dan mengabaikan kekayaan pluralisme.

Teori Pendidikan Multikultural adalah sebuah pendekatan pendidikan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan belajar yang setara kepada semua siswa, tanpa memandang latar belakang ras, etnis, budaya, bahasa, atau kelas sosial mereka. Menurut James A. Banks (2004), salah satu tokoh utama dalam teori ini, pendidikan multikultural bukan hanya tentang menambahkan materi pelajaran tentang keberagaman, tetapi merupakan sebuah reformasi sekolah secara keseluruhan yang mengubah cara pandang, kurikulum, dan struktur institusi pendidikan. Inti dari teori ini adalah memberdayakan siswa dari kelompok-kelompok yang termarginalisasi, membantu semua siswa untuk memahami dan menghargai keberagaman, dan mempersiapkan mereka untuk berpartisipasi dalam masyarakat demokratis yang pluralistik. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi prasangka, menghilangkan diskriminasi, dan membangun masyarakat yang lebih adil dan inklusif.

Berikut adalah langkah-langkah praktis untuk menerapkan Teori Pendidikan Multikultural:

a. Integrasi konten (*content integration*)

Mengintegrasikan materi, konsep, dan teori dari berbagai budaya dan kelompok etnis ke dalam kurikulum mata pelajaran. Ini bukan hanya tentang menambahkan "pahlawan" dari minoritas, tetapi menyatukan perspektif beragam ke dalam setiap aspek pembelajaran. Contoh Aplikasi: Dalam pelajaran sejarah, guru tidak hanya mengajarkan sejarah dari perspektif dominan, tetapi juga memasukkan kisah-kisah dan kontribusi dari kelompok-kelompok etnis, perempuan, atau minoritas agama.

b. Konstruksi pengetahuan (*knowledge construction*)

Membantu siswa memahami bagaimana pengetahuan diciptakan dan bagaimana asumsi-asumsi budaya, kerangka referensi, dan prasangka dalam suatu disiplin ilmu memengaruhi cara pengetahuan dibangun. Contoh Aplikasi: Dalam pelajaran sains, guru bisa mendiskusikan bagaimana penemuan-penemuan ilmiah pada masa lalu sering kali didominasi oleh ilmuwan laki-laki dari Barat dan bagaimana pengetahuan dari budaya lain (misalnya, pengobatan herbal tradisional) dapat memberikan kontribusi yang berbeda.

c. Pengurangan prasangka (*prejudice reduction*)

Mengembangkan strategi dan aktivitas pembelajaran yang dirancang untuk membantu siswa mengembangkan sikap dan nilai-nilai yang lebih positif terhadap kelompok etnis, ras, dan budaya yang berbeda dari diri mereka. Contoh Aplikasi: Mengundang pembicara dari berbagai latar belakang budaya atau menyelenggarakan festival multikultural di sekolah untuk memberikan pengalaman interaktif yang dapat mengurangi stereotip.

d. Pedagogi yang setara (*equity pedagogy*)

Menerapkan metode pembelajaran yang mengakomodasi gaya belajar yang beragam dari siswa yang berbeda latar belakang. Guru memodifikasi cara mengajar mereka untuk memfasilitasi pencapaian akademik bagi semua siswa, terlepas dari latar belakang budaya mereka. Contoh Aplikasi: Menggunakan berbagai format penilaian (proyek, presentasi lisan, esai) untuk memastikan siswa dari berbagai latar belakang budaya memiliki kesempatan yang adil untuk menunjukkan pemahaman mereka, alih-alih hanya mengandalkan tes tertulis.

e. Pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sosial (*empowering school culture and social structure*)

Mereformasi seluruh lingkungan sekolah agar mencerminkan keberagaman, termasuk struktur kepemimpinan, hubungan antar staf dan siswa, dan kebijakan sekolah. Tujuannya adalah menciptakan budaya sekolah yang inklusif dan adil. Contoh Aplikasi: Memastikan bahwa poster, bahan bacaan, dan perayaan hari besar di sekolah mewakili berbagai budaya yang ada di lingkungan sekolah.

4. Teori humanisme dalam pendidikan (*humanistic education theory*)

Teori ini berpusat pada perkembangan potensi penuh individu. Carl Rogers, salah satu tokohnya, menekankan pentingnya pembelajaran yang berpusat pada siswa dan relevan dengan pengalaman mereka. Kurikulum yang tidak kontekstual dan hanya berfokus pada hafalan dapat menghambat perkembangan pribadi siswa.

Teori Humanisme dalam pendidikan berakar pada keyakinan bahwa setiap individu memiliki potensi bawaan untuk berkembang dan mencapai aktualisasi diri. Teori ini, yang dipengaruhi oleh pemikiran psikolog seperti Carl Rogers dan Abraham Maslow, memandang siswa bukan sebagai wadah kosong yang harus diisi, melainkan sebagai individu unik dengan kebutuhan, emosi, dan aspirasi pribadi (Rogers, 1969). Pendidikan, menurut teori ini, harus berpusat pada siswa (*student-centered*) dan bertujuan untuk membantu mereka tumbuh secara holistik—tidak hanya secara kognitif, tetapi juga emosional dan sosial. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan belajar yang aman, suportif, dan bebas dari ancaman, di mana siswa merasa dihargai dan termotivasi dari dalam (*intrinsic motivation*) untuk belajar dan mengeksplorasi potensi mereka sepenuhnya.

Berikut adalah langkah-langkah praktis untuk menerapkan Teori Humanisme dalam proses pendidikan:

a. Menciptakan lingkungan belajar yang aman dan empatik

Langkah pertama adalah membangun hubungan yang tulus antara guru dan siswa. Guru harus menunjukkan empati, penerimaan tanpa syarat (*unconditional positive regard*), dan pemahaman terhadap perasaan serta perspektif siswa. Lingkungan fisik kelas juga harus kondusif dan mengundang. Contoh Aplikasi: Guru menyambut setiap siswa dengan hangat, mendengarkan kekhawatiran mereka, dan memastikan kelas adalah tempat di mana kesalahan diterima sebagai bagian dari proses belajar.

b. Pembelajaran berpusat pada siswa (*student-centered learning*)

Alih-alih guru menjadi satu-satunya sumber pengetahuan, pembelajaran didesain agar siswa menjadi subjek aktif dalam proses belajar mereka. Guru berperan sebagai fasilitator yang memandu, memberikan sumber daya, dan mendukung inisiatif siswa. Contoh Aplikasi: Guru memberikan pilihan topik untuk proyek penelitian, membiarkan siswa memilih buku yang ingin mereka baca, atau mengorganisir diskusi kelompok di mana siswa berbagi ide dan perspektif mereka.

c. Fokus pada pembelajaran holistik dan relevan

Kurikulum tidak hanya menekankan pada mata pelajaran akademis, tetapi juga pada pengembangan keterampilan hidup, kecerdasan emosional, dan kreativitas. Materi pelajaran dikaitkan dengan pengalaman dan minat pribadi siswa, sehingga menjadi lebih bermakna. Contoh Aplikasi: Dalam pelajaran seni, siswa tidak hanya belajar teknik melukis, tetapi juga mengekspresikan emosi atau pengalaman pribadi mereka melalui karya seni.

d. Menumbuhkan motivasi intrinsik dan tanggung jawab diri

Hindari penggunaan hukuman atau hadiah eksternal yang berlebihan. Sebaliknya, dorong siswa untuk menemukan motivasi dari dalam diri mereka untuk belajar. Berikan otonomi dan tanggung jawab, sehingga mereka merasa memiliki proses pendidikan mereka sendiri. Contoh Aplikasi: Guru bisa menggunakan sistem evaluasi formatif yang berfokus pada umpan balik konstruktif, bukan hanya nilai angka. Siswa juga diberi tanggung jawab untuk mengatur tugas dan waktu belajar mereka.

e. Evaluasi kualitatif dan berorientasi pada pertumbuhan

Penilaian tidak hanya mengukur penguasaan materi, tetapi juga menilai kemajuan pribadi, kreativitas, dan partisipasi siswa. Evaluasi lebih bersifat deskriptif dan berfokus pada pertumbuhan individu daripada perbandingan dengan siswa lain. Contoh Aplikasi: Menggunakan portofolio yang berisi refleksi dan proyek-proyek siswa sepanjang semester sebagai metode penilaian, alih-alih hanya mengandalkan ujian akhir.

5. Teori kesenjangan digital (*digital divide theory*)

Meskipun sering digunakan dalam konteks teknologi, teori ini relevan untuk menunjukkan bahwa kurikulum yang tidak mengintegrasikan literasi digital menciptakan kesenjangan antara siswa yang memiliki akses dan keterampilan digital dengan mereka yang tidak. Pendidikan agama yang mengabaikan isu-isu

digital akan gagal mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan etika dan sosial di era modern.

Teori Kesenjangan Digital (Digital Divide Theory) adalah kerangka konseptual yang menjelaskan adanya kesenjangan antara individu, rumah tangga, bisnis, dan wilayah geografis yang memiliki akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan mereka yang tidak memilikinya. Teori ini tidak hanya membahas masalah akses fisik terhadap perangkat keras (komputer, ponsel) dan koneksi internet, tetapi juga mencakup perbedaan dalam keterampilan digital, literasi digital, dan kemampuan untuk memanfaatkan teknologi secara efektif untuk meningkatkan kualitas hidup, pendidikan, dan peluang ekonomi (Norris, 2001). Kesenjangan ini menciptakan ketidaksetaraan yang lebih dalam di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan partisipasi sipil, sehingga memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi yang sudah ada. Kesenjangan digital bukan hanya isu teknis, melainkan masalah sosial yang kompleks yang membutuhkan solusi multidimensi.

Berikut adalah langkah-langkah sistematis yang dapat dilakukan untuk mengurangi dan mengatasi kesenjangan digital, berdasarkan teori dan praktik yang ada:

a. Peningkatan akses infrastruktur (*infrastructure access*)

Langkah pertama adalah memastikan ketersediaan akses fisik terhadap perangkat TIK dan internet yang terjangkau dan andal, terutama di daerah pedesaan, terpencil, dan komunitas berpenghasilan rendah. Ini melibatkan pembangunan infrastruktur telekomunikasi seperti menara seluler dan jaringan serat optik. Contoh Aplikasi: Pemerintah dapat memberikan subsidi untuk penyediaan akses internet di pedesaan, atau lembaga nirlaba dapat mendonasikan komputer dan tablet ke sekolah-sekolah di daerah yang kurang mampu.

b. Pengembangan literasi dan keterampilan digital (*digital literacy and skills development*)

Akses fisik saja tidak cukup. Penting untuk membekali masyarakat dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk menggunakan teknologi secara efektif, termasuk kemampuan dasar mengoperasikan perangkat, mencari informasi yang kredibel secara *online*, dan memahami risiko keamanan siber. Contoh Aplikasi: Program pelatihan gratis, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun sektor swasta, yang mengajarkan keterampilan digital dasar untuk masyarakat umum, lansia, dan pelaku usaha mikro.

c. Penyediaan konten dan aplikasi yang relevan (*relevant content and application*)

Memastikan bahwa konten dan layanan digital yang tersedia relevan dengan kebutuhan, bahasa, dan budaya masyarakat lokal. Konten ini harus dapat membantu mereka dalam kehidupan sehari-hari, seperti layanan e-pemerintah, aplikasi kesehatan, dan platform pendidikan. Contoh Aplikasi: Pengembangan aplikasi pertanian yang memberikan informasi cuaca dan harga pasar lokal, atau pembuatan platform pendidikan daring dengan materi pelajaran yang disesuaikan dengan kurikulum nasional.

d. Kebijakan inklusif dan partisipasi publik (*inclusive policy and public participation*)

Mengembangkan kebijakan publik yang secara eksplisit menargetkan dan mendukung kelompok-kelompok yang rentan terhadap kesenjangan digital, seperti lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat. Kebijakan ini harus melibatkan partisipasi aktif dari komunitas yang terdampak. Contoh Aplikasi: Pemerintah dapat menetapkan regulasi yang menjamin aksesibilitas situs web dan aplikasi publik untuk penyandang disabilitas atau membentuk forum konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dari komunitas yang kurang terlayani.

e. Pendekatan holistik (*holistic approach*)

Mengatasi kesenjangan digital tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil untuk menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan. Contoh Aplikasi: Menciptakan kemitraan antara perusahaan teknologi, universitas, dan lembaga non-profit untuk meluncurkan inisiatif bersama yang menggabungkan donasi perangkat keras, pelatihan keterampilan, dan pengembangan konten.

6. Teori konstruktivisme sosial (*social constructivism*)

Teori ini, yang dihubungkan dengan Lev Vygotsky, berargumen bahwa pembelajaran adalah proses sosial di mana siswa membangun pengetahuan mereka melalui interaksi dengan orang lain dan lingkungan. Kurikulum yang tidak menyediakan ruang untuk diskusi, kolaborasi, dan interaksi dengan berbagai pandangan akan gagal memfasilitasi konstruksi pengetahuan yang komprehensif.

Teori Konstruktivisme Sosial, yang dikembangkan oleh psikolog Lev Vygotsky, berfokus pada ide bahwa pembelajaran dan perkembangan kognitif adalah proses sosial. Berbeda dengan konstruktivisme individual yang menekankan pada pembangunan pengetahuan internal oleh individu, teori ini menyoroti peran penting interaksi sosial, budaya, dan bahasa dalam pembentukan pemahaman dan makna (Vygotsky, 1978). Dalam pandangan ini, pengetahuan tidak hanya ditemukan, tetapi secara aktif "dibangun" atau "dikonstruksi" melalui kolaborasi dan dialog dengan orang lain yang lebih ahli, seperti guru atau teman sebaya. Intinya, pemahaman seorang individu tentang dunia tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan budaya di mana ia berada. Oleh karena itu, pendidikan yang efektif harus menciptakan lingkungan yang kaya interaksi dan kolaborasi untuk memfasilitasi proses pembelajaran ini.

Berikut adalah langkah-langkah praktis untuk menerapkan Teori Konstruktivisme Sosial dalam pendidikan:

a. Fokus pada zona perkembangan proksimal (ZPD)

Langkah pertama adalah mengidentifikasi Zona Perkembangan Proksimal (ZPD), yaitu area di mana seorang siswa belum bisa melakukan sesuatu secara mandiri, tetapi bisa melakukannya dengan bantuan dari orang lain yang lebih kompeten (seperti guru atau teman sebaya). Pembelajaran paling efektif terjadi di zona ini. Contoh Aplikasi: Guru memberikan tugas yang sedikit di atas kemampuan siswa saat ini. Saat siswa kesulitan, guru memberikan petunjuk atau bantuan yang disesuaikan (*scaffolding*) untuk membimbing siswa mencapai pemahaman atau penyelesaian tugas.

b. Pembelajaran kolaboratif dan kelompok

Gunakan metode pembelajaran yang mendorong interaksi dan kolaborasi antar siswa. Pembelajaran tidak hanya terjadi antara guru dan siswa, tetapi juga di antara sesama siswa. Melalui diskusi kelompok, siswa saling berbagi ide, mempertanyakan asumsi, dan membangun pemahaman bersama. Contoh Aplikasi: Mengatur proyek kelompok di mana siswa dengan beragam kemampuan bekerja sama untuk memecahkan masalah. Siswa yang lebih menguasai topik dapat membantu teman sebayanya, sehingga proses belajar menjadi timbal balik.

c. Menggunakan alat dan artefak budaya

Incorporate alat-alat dan artefak budaya—seperti bahasa, simbol, buku, atau teknologi—ke dalam proses belajar. Vygotsky berpendapat bahwa alat-alat ini berfungsi sebagai mediasi yang membantu siswa memahami dan berinteraksi dengan dunia mereka. Contoh Aplikasi: Menggunakan peta, model 3D, atau perangkat lunak simulasi untuk membantu siswa memvisualisasikan konsep yang kompleks. Bahasa juga menjadi alat utama dalam diskusi dan penjelasan.

d. Peran guru sebagai fasilitator dan mediator

Alih-alih sebagai sumber pengetahuan tunggal, peran guru bergeser menjadi fasilitator dan mediator. Guru bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dialog, menyediakan tantangan yang sesuai, dan memediasi interaksi antar siswa. Contoh Aplikasi: Guru tidak langsung memberikan jawaban saat siswa bertanya, tetapi mengajukan pertanyaan lanjutan untuk memandu siswa menemukan solusi sendiri atau mengarahkan mereka untuk berdiskusi dengan teman sebayanya.

e. Penilaian berbasis proses dan dialog

Penilaian tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses siswa dalam membangun pemahaman. Evaluasi dapat dilakukan melalui observasi, partisipasi dalam diskusi, dan analisis portofolio yang menunjukkan kemajuan siswa seiring waktu. Contoh Aplikasi: Guru menilai siswa berdasarkan seberapa efektif mereka berpartisipasi dalam diskusi kelompok, seberapa baik mereka menjelaskan pemikiran mereka kepada orang lain, dan bagaimana mereka menggunakan umpan balik untuk memperbaiki pekerjaan mereka.

7. Teori konflik (*conflict theory*)

Teori sosiologis ini, yang diadaptasi dalam pendidikan, melihat sekolah sebagai arena pertarungan antara berbagai kelompok kepentingan. Dalam konteks kurikulum, dominasi pendekatan monolitik dapat dilihat sebagai cerminan kekuasaan kelompok tertentu yang mengontrol narasi keagamaan. Teori ini menjelaskan mengapa perubahan kurikulum berjalan lambat, karena adanya resistensi dari kelompok-kelompok yang merasa kepentingannya terancam oleh perubahan.

Teori Konflik adalah sebuah kerangka sosiologis yang memandang masyarakat sebagai arena pertarungan untuk memperebutkan sumber daya yang terbatas. Dipelopori oleh pemikiran Karl Marx dan dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Max Weber dan Ralf Dahrendorf, teori ini menolak gagasan bahwa masyarakat adalah entitas yang harmonis dan stabil. Sebaliknya, Teori Konflik berpendapat bahwa ketidaksetaraan, dominasi, dan persaingan adalah karakteristik yang melekat dalam struktur sosial (Marx, 1867/1977). Kelompok-kelompok yang memiliki kekuasaan dan sumber daya cenderung menggunakan posisi mereka untuk mempertahankan status quo, sementara kelompok yang kurang beruntung

akan berusaha menantang dominasi tersebut untuk mendapatkan bagian yang lebih adil. Intinya, konflik dianggap sebagai pendorong utama perubahan sosial.

Berikut adalah langkah-langkah untuk menerapkan Teori Konflik dalam menganalisis fenomena sosial, seperti ketidaksetaraan dalam pendidikan, politik, atau ekonomi:

a. Identifikasi kelompok dominan dan subordinat

Langkah pertama adalah mengidentifikasi dua atau lebih kelompok yang memiliki kepentingan yang saling bertentangan. Tentukan kelompok mana yang memegang kendali atas sumber daya (kelompok dominan) dan kelompok mana yang dieksploitasi atau termarginalisasi (kelompok subordinat). Dalam analisis ketidaksetaraan pendidikan, kelompok dominan bisa jadi adalah elit yang memiliki akses ke sekolah swasta berkualitas, sementara kelompok subordinat adalah masyarakat miskin yang hanya bisa mengakses sekolah negeri dengan fasilitas terbatas.

b. Analisis sumber daya yang diperebutkan

Tentukan dengan jelas apa yang menjadi objek konflik. Sumber daya ini bisa berupa materi (uang, tanah, pekerjaan), non-materi (kekuasaan politik, status sosial, pendidikan berkualitas), atau ideologi (nilai-nilai, norma, keyakinan). Dalam konflik buruh-manajemen, sumber daya yang diperebutkan adalah upah yang lebih tinggi, kondisi kerja yang layak, dan pembagian keuntungan perusahaan.

c. Mengungkap mekanisme dominasi dan kontrol

Periksa bagaimana kelompok dominan menggunakan kekuasaan mereka untuk mempertahankan kontrol. Mekanisme ini bisa berupa penggunaan kekerasan fisik, kontrol atas media dan informasi, manipulasi sistem hukum, atau indoktrinasi ideologi melalui lembaga seperti sekolah. Perusahaan besar mungkin menggunakan lobi politik dan sumber daya finansial untuk memengaruhi undang-undang yang merugikan hak-hak buruh atau mencegah pembentukan serikat pekerja.

d. Mengkaji potensi dan manifestasi konflik

Teliti bagaimana ketegangan dan perlawanan dari kelompok subordinat muncul. Konflik bisa bermanifestasi secara terbuka (demonstrasi, mogok kerja, revolusi) atau tersembunyi (resistensi pasif, sabotase, atau penolakan budaya). Teori ini melihat perlawanan sebagai respons alami terhadap ketidakadilan. Masyarakat adat melakukan demonstrasi menolak pembangunan proyek yang merampas tanah mereka, atau kaum perempuan menuntut hak-hak yang sama di tempat kerja.

e. Memprediksi perubahan sosial

Teori Konflik berpendapat bahwa resolusi konflik dapat mengarah pada perubahan mendasar dalam struktur masyarakat. Analisis ini mencoba memprediksi bagaimana perlawanan dari kelompok subordinat akan memengaruhi pembagian kekuasaan dan sumber daya di masa depan. Konflik antara gerakan hak-hak sipil dan struktur rasial di Amerika Serikat pada akhirnya menghasilkan perubahan undang-undang dan norma sosial yang lebih setara.

Dukungan Konseptual

1. Teori konstruktivisme sosial (Lev Vygotsky)

Teori ini berfokus pada bagaimana pembelajaran adalah proses sosial yang terjadi melalui interaksi. Kurikulum agama yang doktrinal dan kaku menghambat siswa untuk mengonstruksi pemahaman mereka sendiri tentang isu-isu modern. Pembelajaran yang berpusat pada guru tidak memungkinkan siswa berdialog tentang keberagaman, sehingga pemahaman mereka menjadi dangkal dan tidak kontekstual.

2. Teori Kritis Pendidikan (Paulo Freire)

Freire mengkritik "pendidikan gaya bank" yang hanya mengisi pikiran siswa dengan informasi. Kurikulum agama yang monolitik dan berbasis hafalan adalah contoh nyata dari pendekatan ini. Teori ini menawarkan pendidikan pembebasan yang mendorong siswa berpikir kritis dan menjadi agen perubahan. Tanpa pendekatan kritis, siswa akan kesulitan memahami dan mengatasi masalah sosial seperti intoleransi.

3. Teori Pendidikan Transformasi (Jack Mezirow)

Teori ini berfokus pada bagaimana individu mengubah kerangka referensi mereka untuk membuat pemahaman yang lebih inklusif dan reflektif. Kurikulum agama yang doktrinal cenderung mempertahankan kerangka berpikir yang sempit. Mezirow berpendapat bahwa pendidikan yang relevan harus mendorong siswa untuk merefleksikan asumsi-asumsi mereka agar dapat mengembangkan perspektif yang lebih toleran dan adaptif.

4. Teori Pembelajaran Kontekstual (John Dewey)

Dewey menekankan bahwa pembelajaran harus terjadi dalam konteks nyata dan relevan dengan kehidupan siswa. Kurikulum agama yang tidak relevan gagal menghubungkan ajaran dengan pengalaman siswa sehari-hari, seperti tantangan literasi digital. Teori ini mendukung pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai agama ke dalam isu-isu kontemporer sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan fungsional.

5. Empat Pilar Pendidikan (UNESCO)

UNESCO mengidentifikasi empat pilar pembelajaran yang krusial: belajar untuk tahu, belajar untuk berbuat, belajar untuk hidup bersama, dan belajar untuk menjadi. Kurikulum agama yang ada terlalu fokus pada "belajar untuk tahu" (aspek doktrinal) dan mengabaikan tiga pilar lainnya yang esensial untuk menghadapi keberagaman dan tantangan sosial. Keterbatasan ini membuat lulusan kurang siap secara sosial dan profesional.

6. Teori Interaksionisme Simbolik (George Herbert Mead)

Teori ini menjelaskan bagaimana individu membangun makna melalui interaksi sosial dan simbol. Dalam konteks toleransi, interaksi yang terbatas dengan orang dari latar belakang berbeda akan menghasilkan pemahaman yang dangkal. Kurikulum agama yang monolitik gagal menyediakan ruang interaksi untuk memahami simbol dan makna dari agama lain, sehingga menumbuhkan stereotip dan prasangka.

7. Teori Sistem (Ludwig von Bertalanffy)

Teori ini melihat suatu entitas sebagai sebuah sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berinteraksi. Kurikulum adalah sebuah sistem, di mana perubahan pada satu elemen (misalnya, materi ajar) akan memengaruhi elemen lain (seperti metode pengajaran dan hasil pembelajaran). Keterlambatan pembaruan kurikulum menunjukkan bahwa sistem ini tidak fleksibel dan tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan eksternal (kebutuhan zaman), sehingga menyebabkan kegagalan fungsional secara keseluruhan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang bertujuan untuk mendalami dan menganalisis secara komprehensif fenomena relevansi kurikulum pendidikan agama. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dengan guru mata pelajaran pendidikan agama, siswa, kepala sekolah, dan perwakilan dari Kementerian Agama, serta observasi partisipatif di beberapa madrasah dan sekolah umum. Selain itu, instrumen penelitian utama adalah pedoman wawancara terstruktur dan semi-terstruktur, pedoman observasi, dan analisis dokumen kurikulum (silabus, RPP, dan buku ajar). Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis menggunakan analisis kajian (kajian pustaka) untuk membandingkan temuan empiris di lapangan dengan teori-teori relevansi kurikulum, pedagogi, dan kebijakan pendidikan. Proses analisis data mencakup reduksi data, penyajian data dalam bentuk narasi dan deskripsi, dan penarikan kesimpulan untuk mengidentifikasi pola kesenjangan pengetahuan, keterampilan, dan hambatan implementasi kebijakan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

Analisis dan pembahasan ini mengkaji temuan dari penelitian yang mengeksplorasi relevansi kurikulum pendidikan agama yang diterapkan oleh Kementerian Agama. Berdasarkan data kualitatif yang dikumpulkan, ditemukan adanya kesenjangan signifikan antara tujuan kurikulum dan hasil yang dicapai di lapangan, yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan implementasi kebijakan.

Berikut adalah rincian analisis dan pembahasan dalam bentuk tabel untuk memberikan gambaran yang lebih terstruktur.

Aspek Analisis	Kesenjangan Ditemukan	Pembahasan dan Implikasi
Kesenjangan Pengetahuan (Aspek Kognitif)	Kurikulum berorientasi pada hafalan dan teoretis. Siswa kesulitan menghubungkan materi agama dengan konteks kehidupan nyata dan isu-isu kontemporer.	Pembelajaran agama cenderung dogmatis dan tidak mendorong pemahaman kritis. Siswa mungkin memiliki pengetahuan tekstual yang kuat, tetapi minim pemahaman tentang relevansi nilai-nilai agama dalam menghadapi tantangan modern seperti etika AI, intoleransi, dan polarisasi sosial.

Aspek Analisis	Kesenjangan Ditemukan	Pembahasan dan Implikasi
Kesenjangan Keterampilan (Aspek Psikomotorik)	Minimnya penekanan pada keterampilan praktis. Keterampilan seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, dan literasi digital tidak menjadi fokus utama dalam proses belajar mengajar.	Kurikulum gagal membekali siswa dengan kompetensi abad ke-21. Lulusan cenderung pasif dan kurang inisiatif dalam menerapkan nilai-nilai agama secara produktif, seperti dalam advokasi sosial atau kegiatan filantropi berbasis keagamaan.
Kesenjangan Sikap (Aspek Afektif)	Disparitas antara nilai-nilai yang diajarkan dan implementasi sehari-hari. Nilai-nilai toleransi dan pluralisme seringkali hanya diajarkan di kelas tanpa ada upaya nyata untuk mempraktikkannya.	Pembelajaran agama tidak sepenuhnya berhasil membentuk karakter yang berintegrasi. Siswa mungkin memahami konsep-konsep moralitas, tetapi tidak menunjukkan sikap toleran atau inklusif dalam interaksi sosial mereka. Ini berpotensi menciptakan individu yang berpengetahuan, namun tidak memiliki kecerdasan emosional dan sosial yang kuat.
Hambatan Implementasi Kebijakan	Kurangnya pelatihan guru yang efektif dan berkelanjutan. Guru tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk menerapkan metode pembelajaran inovatif yang relevan dengan kurikulum baru.	Program pelatihan yang ada seringkali bersifat satu kali dan tidak menindaklanjuti. Ini menyebabkan guru kembali ke pola mengajar tradisional yang sudah mereka kenal. Implementasi kurikulum menjadi tidak merata dan sangat bergantung pada inisiatif individu guru.
Keterbatasan Sumber Daya dan Fasilitas	Fasilitas pendukung, terutama teknologi, terbatas. Banyak sekolah, khususnya di daerah terpencil, kekurangan akses internet, perangkat keras, dan buku referensi yang memadai.	Pembelajaran menjadi statis dan hanya mengandalkan buku teks. Ini membatasi kemampuan guru untuk mengintegrasikan media digital atau sumber belajar interaktif yang dapat membuat materi lebih menarik dan relevan bagi generasi digital saat ini.

Limitasi Kajian

Kajian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, meskipun mendalam, tidak memungkinkan generalisasi hasil ke seluruh populasi madrasah dan sekolah di Indonesia. Temuan yang ada sangat bergantung pada konteks spesifik dari lokasi penelitian (sekolah dan madrasah yang dipilih) dan pandangan subjektif dari para informan (guru, siswa, dan pembuat kebijakan). Kedua, analisis data sangat bergantung

pada interpretasi peneliti terhadap wawancara, observasi, dan dokumen, yang berpotensi memengaruhi bias. Ketiga, kajian ini terbatas pada kurikulum pendidikan agama yang berlaku saat ini, sehingga tidak mencakup perbandingan historis atau perkembangan kurikulum dari waktu ke waktu. Keterbatasan waktu dan sumber daya juga membatasi jumlah informan yang dapat diwawancarai, yang mungkin tidak merepresentasikan keragaman pandangan yang ada di lapangan.

Kebaruan/Kontribusi

Makalah kebijakan ini menawarkan kebaruan dan kontribusi signifikan dalam diskursus pendidikan agama di Indonesia dengan tiga cara utama. *Pertama*, berbeda dari studi sebelumnya yang cenderung berfokus pada konten kurikulum secara teoretis, makalah ini secara spesifik menganalisis kesenjangan triadik (*triadic gap*) yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan implementasi kebijakan di tingkat praktik. Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih holistik dan praktis tentang masalah relevansi kurikulum, tidak hanya dari sisi dokumen, tetapi juga dari pengalaman nyata di lapangan.

Kedua, makalah ini menyajikan bukti empiris kualitatif yang mendalam dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk guru, siswa, dan pembuat kebijakan. Dengan demikian, makalah ini tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga menyoroti akar penyebabnya, seperti kurangnya pelatihan guru yang efektif dan terbatasnya sumber daya. Ini memberikan landasan yang kuat untuk rekomendasi kebijakan yang lebih terarah dan spesifik, bukan sekadar solusi umum.

Ketiga, makalah ini tidak hanya berhenti pada analisis masalah, tetapi juga menawarkan rekomendasi kebijakan yang inovatif dan terukur. Usulan untuk mereorientasi kurikulum dari berbasis konten menjadi berbasis kompetensi dan mengintegrasikan literasi digital secara eksplisit adalah kontribusi orisinal yang relevan dengan tantangan pendidikan abad ke-21. Dengan demikian, makalah ini berfungsi sebagai cetak biru (*blueprint*) praktis bagi Kementerian Agama untuk melakukan reformasi kurikulum yang efektif dan berkelanjutan.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

1. Perubahan desain kurikulum pendidikan agama

Kebijakan ini akan merevisi Peraturan Menteri Agama (PMA) terkait kurikulum pendidikan agama. Tujuannya adalah untuk mengubah orientasi kurikulum dari yang berpusat pada doktrin menjadi kurikulum berbasis kompetensi yang terintegrasi.

Implementasi: PMA baru akan mewajibkan setiap materi pelajaran agama untuk mengintegrasikan empat pilar pembelajaran UNESCO (belajar untuk tahu, belajar untuk berbuat, belajar untuk hidup bersama, dan belajar untuk menjadi). Kurikulum akan memasukkan modul wajib tentang literasi digital, toleransi antarumat beragama, dan kewirausahaan. Contohnya, pelajaran Fikih tidak hanya membahas teori zakat, tetapi juga studi kasus tentang pendayagunaan zakat untuk proyek kewirausahaan sosial.

2. Peningkatan standar kompetensi guru pendidikan agama

Kebijakan ini menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang standar minimum kompetensi guru agama. Tujuannya adalah untuk memastikan

guru memiliki kemampuan tidak hanya dalam mengajar materi, tetapi juga dalam memfasilitasi diskusi kritis dan pembelajaran kontekstual.

Implementasi: Regulasi ini akan mewajibkan semua guru pendidikan agama, baik yang baru maupun yang sudah mengajar, untuk mengikuti program pelatihan khusus (diklat) tentang metode pembelajaran kritis, pendidikan perdamaian, dan integrasi isu-isu kontemporer. Sertifikasi guru akan diperbarui dengan memasukkan penilaian terhadap kompetensi ini, sehingga ada insentif bagi guru untuk terus meningkatkan kualitas mengajarnya. Kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil (OMS) yang ahli di bidang toleransi dan pendidikan kritis akan diresmikan dalam regulasi ini.

3. Penguatan sistem pengawasan dan evaluasi kurikulum

Kebijakan ini menerbitkan Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam yang menetapkan sistem evaluasi dan pengawasan kurikulum secara berkala dan terstruktur. Tujuannya adalah untuk memastikan kurikulum yang telah direvisi benar-benar diimplementasikan dengan baik di sekolah dan madrasah, serta dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan zaman.

Untuk menentukan rekomendasi kebijakan, penulis menganalisis ke tiga alternatif kebijakan di atas menggunakan kriteria dari Teori Skoring Alternatif Kebijakan William N. Dunn, yaitu: Penilaian menggunakan skala 1-5, di mana 1 adalah sangat rendah dan 5 adalah sangat tinggi sebagai berikut:

Kriteria	Perubahan Desain Kurikulum	Peningkatan Standar Guru	Penguatan Sistem Pengawasan	Analisis
Efektivitas	5	4	3	Perubahan desain kurikulum langsung menasar akar masalah dan berdampak luas. Peningkatan kompetensi guru juga efektif, tapi butuh waktu lama. Pengawasan efektif, tapi tidak akan mengubah apa pun tanpa kurikulum dan guru yang mumpuni.
Efisiensi	3	2	4	Perubahan kurikulum membutuhkan biaya besar, namun lebih efisien dari sisi dampak. Peningkatan kompetensi guru sangat mahal dan memakan waktu. Pengawasan lebih efisien karena dapat menggunakan teknologi, namun outputnya terbatas jika tidak ada perubahan lain.
Kecukupan	4	4	2	Perubahan kurikulum dan peningkatan kompetensi guru sama-sama memadai untuk menyelesaikan masalah. Namun, pengawasan saja tidak akan cukup karena hanya

Kriteria	Perubahan Desain Kurikulum	Peningkatan Standar Guru	Penguatan Sistem Pengawasan	Analisis
				mengidentifikasi masalah tanpa menawarkan solusi substantif.
Pemerataan	4	3	5	Desain kurikulum yang baru bisa diterapkan di seluruh sekolah. Namun, pelatihan guru sulit menjangkau daerah terpencil. Sistem pengawasan digital bisa lebih merata ke seluruh wilayah.
Responsivitas	3	4	5	Perubahan kurikulum cukup responsif terhadap isu modern, namun prosesnya lambat. Pelatihan guru bisa lebih cepat merespons isu baru. Pengawasan adalah yang paling responsif karena langsung memberikan umpan balik (feedback) secara real-time.
Total Skor	19	17	19	

Berdasarkan skoring di atas, baik perubahan desain kurikulum maupun penguatan sistem pengawasan mendapatkan skor tertinggi (19). Namun, keduanya memiliki peran yang berbeda:

1. Perubahan Desain Kurikulum adalah solusi paling fundamental dan memiliki efektivitas tertinggi dalam jangka panjang. Solusi ini langsung menyentuh inti masalah.
2. Penguatan Sistem Pengawasan adalah solusi yang paling responsif dan merata. Solusi ini berperan sebagai pendukung yang memastikan implementasi berjalan baik dan memberikan *feedback* berkelanjutan.

Kebijakan yang dipilih adalah Perubahan Desain Kurikulum Pendidikan Agama dengan merevisi Peraturan Menteri Agama (PMA) terkait kurikulum pendidikan agama.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Berdasarkan analisis yang mendalam, dapat disimpulkan bahwa kurikulum pendidikan agama yang diterapkan oleh Kementerian Agama saat ini memiliki kesenjangan signifikan dengan kebutuhan nyata siswa dan tantangan zaman. Kurikulum yang ada cenderung berfokus pada aspek *teoritis* dan *hafalan*, sehingga gagal membekali peserta didik dengan keterampilan kritis, literasi digital, dan pemahaman kontekstual yang esensial di era modern. Kesenjangan ini diperparah oleh tantangan dalam implementasi kebijakan, seperti kurangnya pelatihan guru yang efektif dan keterbatasan sumber daya di sekolah. Oleh karena itu, diperlukan reformasi substantif yang tidak hanya mengubah

isi kurikulum, tetapi juga memperkuat sistem pendukungnya. Tanpa perubahan ini, pendidikan agama berisiko menjadi tidak relevan, gagal membentuk generasi muda yang tidak hanya beriman dan berakhlak mulia, tetapi juga mampu berkontribusi secara positif dan adaptif di tengah kompleksitas masyarakat global.

Rekomendasi

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, rekomendasi untuk mengatasi masalah kurikulum pendidikan agama yang tidak relevan. Direkomendasikan kepada Menteri Agama merevisi Peraturan Menteri Agama tentang Kurikulum Pendidikan Agama untuk mengubah orientasi dari *doktrinal* ke kompetensi praktis, yang mencakup literasi digital, toleransi, dan kewirausahaan.

REFERENSI

- Banks, J. A. (2004). *Multicultural education: Historical development, dimensions, and practice*. In J. A. Banks & C. A. M. Banks (Eds.), *Handbook of research on multicultural education* (pp. 3–29). Jossey-Bass.
- Bennett, C. I. (2011). *Comprehensive multicultural education: Theory and practice*. Pearson.
- Bruner, J. S. (1996). *The culture of education*. Harvard University Press.
- Cahyono, B., & Wulandari, R. (2018). Kesenjangan soft skills mahasiswa dengan kebutuhan dunia kerja. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 8(2), 127-136.
- Collins, R. (1994). *Four sociological traditions*. Oxford University Press.
- Dahrendorf, R. (1959). *Class and class conflict in industrial society*. Stanford University Press.
- DiMaggio, P., Hargittai, E., Neuman, W. R., & Robinson, J. P. (2001). Social implications of the Internet: The digital divide. *Annual Review of Sociology*, 27, 307–336.
- Eichinger, J., & Downing, J. (2011). *Functional curriculum for students with moderate and severe disabilities*. Brookes Publishing.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the oppressed*. Seabury Press.
- Gay, G. (2010). *Culturally responsive teaching: Theory, research, and practice*. Teachers College Press.
- Giroux, H. A. (2011). *On critical pedagogy*. Bloomsbury Publishing.
- Glatthorn, A. A. (1998). *The functional curriculum: A practical guide to curriculum planning*. Rowman & Littlefield Publishers.
- Hidayat, R. (2018). Problematika pendidikan multikultural di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 175-190.
- hooks, b. (1994). *Teaching to transgress: Education as the practice of freedom*. Routledge.
- Marx, K. (1867/1977). *Capital: A critique of political economy*. Vintage.
- Maslow, A. H. (1968). *Toward a psychology of being*. Van Nostrand Reinhold.

Relevance of the Ministry of Religious Affairs' Religious Education Curriculum: Analysis of Knowledge, Skills, and Policy Implementation Gaps; [167-192]; Dwi Agustiningsih

- McKinsey & Company. (2020). *The future of work: The impact of automation on jobs*. McKinsey Global Institute.
- Norris, P. (2001). *Digital divide: Civic engagement, information poverty, and the Internet worldwide*. Cambridge University Press.
- Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). (2018). *The future of education and skills: Education 2030*. OECD Publishing.
- Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). (2017). *Skills for a changing world*. OECD Publishing.
- Partnership for 21st Century Learning (P21). (2019). *P21 framework for 21st century learning*. P21.
- Rogers, C. R. (1969). *Freedom to learn: A view of what education might become*. Charles E. Merrill.
- Rogers, C. R., & Freiberg, H. J. (1994). *Freedom to learn* (3rd ed.). Merrill/Macmillan.
- Rogoff, B. (2003). *The cultural nature of human development*. Oxford University Press.
- Rosyada, D. (2017). Pendidikan multikultural sebagai solusi atas konflik sosial. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 23(1), 1-14.
- Suharsono. (2017). *Pendidikan multikultural: Konsep dan aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- UNESCO. (2017). *Global education monitoring report: Accountability in education*. UNESCO Publishing.
- United Nations. (1995). *Declaration of principles on tolerance*. UNESCO.
- van Dijk, J. A. G. M. (2020). *The digital divide: The essential guide*. Polity Press.
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.
- Wehmeyer, M. L., & Agran, M. (2018). *Teaching self-determination to students with disabilities*. Guilford Press.
- World Bank. (2019). *World development report 2019: The changing nature of work*. World Bank Publications.

Laporan dan Survei

- Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. (2018). *Pendidikan Agama untuk Era Digital*. Jakarta: PPIM UIN Jakarta.
- Wahid Foundation. (2017). *Laporan Penelitian Sikap Guru dan Dosen Pendidikan Agama Islam Terhadap Isu Toleransi dan Radikalisme*. Jakarta: Wahid Foundation.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Laporan Evaluasi Kurikulum Madrasah*. Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Kemenag RI.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2020). *Laporan Profil Guru PAI*. Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Kemenag RI.
- Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI). (2021). *Survei Tren Penulisan Buku Ajar Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: IKAPI.

- Lembaga Kajian Islam dan Pendidikan (LKIP). (2020). *Analisis Konten Buku Ajar Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: LKIP.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2021). *Laporan Tahunan Perlindungan Anak dalam Ranah Digital*. Jakarta: KPAI.
- Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Kemenag RI. (2021). *Laporan Kesenjangan Implementasi Kurikulum di Daerah*. Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Kemenag RI.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). *Laporan Tahunan Alokasi Anggaran Pendidikan*. (Data tahunan, bervariasi).

